



ANALISIS PROSES PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Haifa¹, Muhammad Nuril Huda², Hanun Asrohah³, Anindya Palmitraazzah⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

⁴ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Email: haifablee@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2424>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 21 June 2026

Keywords:

educational Program planning

Data-Based Decision Making

Planning Inovation



ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the process of educational program planning at the Provincial Education Office of East Java. The study focuses on the overview of educational program planning, planning stages, stakeholder roles, challenges, and innovations in planning. **Methods:** This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. **Result:** The results show that the planning process has been conducted systematically through several stages, including needs identification, data collection, program prioritization, and budgeting. Stakeholders, such as educational institutions and local government, play an important role by providing data and input in the planning process. However, several challenges remain, including incomplete data and limited coordination among stakeholders. To overcome these problems, the Education Office has implemented strategies such as improving coordination and utilizing digital-based information systems. These innovations are expected to increase the effectiveness and efficiency of educational program planning. **Novelty:** This study highlights the importance of collaborative planning and data-based decision-making in educational program planning at the provincial level. The findings are expected to provide references for policymakers in developing more adaptive and effective educational planning systems.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian meliputi gambaran umum perencanaan program pendidikan, tahapan perencanaan, peran pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, serta inovasi dalam perencanaan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan program pendidikan telah dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, penentuan prioritas program, dan penyusunan anggaran. Pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memberikan data dan masukan pada proses perencanaan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti data yang belum lengkap dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan menerapkan berbagai strategi, seperti meningkatkan koordinasi dan memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan program pendidikan. **Kebaruan:** Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan kolaboratif dan pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan program pendidikan di tingkat provinsi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem perencanaan pendidikan yang lebih adaptif dan efektif.

Kata Kunci: Perencanaan Program Pendidikan, Pengambilan Keputusan Berbasis Data, Inovasi Perencanaan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari manajemen yang baik, khususnya pada aspek perencanaan. Perencanaan dalam manajemen pendidikan memiliki peran penting sebagai langkah awal dalam menentukan arah, tujuan, serta program yang akan dilaksanakan. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan program pendidikan berpotensi tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Menurut George R. Terry, perencanaan merupakan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pendidikan, perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan program yang sistematis dan terarah (Terry, 2012).

Sementara itu, Nanang Fattah menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Fattah, 2013).

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan memiliki peran sentral dalam menyusun dan merencanakan program pendidikan yang selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah. Proses perencanaan program pendidikan tidak hanya melibatkan penyusunan kegiatan, tetapi juga mencakup analisis kebutuhan, pengumpulan data, penentuan prioritas, serta penyusunan anggaran. Oleh karena itu, perencanaan yang sistematis dan berbasis data menjadi kunci dalam menghasilkan program pendidikan yang tepat sasaran.

Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan program pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan data yang belum sepenuhnya akurat dan terbaru, kurang optimalnya koordinasi antar stakeholder, serta dinamika kebijakan yang terus berkembang. Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas perencanaan program pendidikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam sistem perencanaan pendidikan mulai dikembangkan, terutama melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam proses perencanaan program pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian meliputi gambaran umum perencanaan, proses dan tahapan perencanaan, peran stakeholder, kendala yang dihadapi, serta inovasi yang dilakukan dalam perencanaan program pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen pendidikan, khususnya pada aspek perencanaan program pendidikan yang lebih efektif dan berbasis data.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perencanaan program pendidikan yang efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Perencanaan yang tidak didasarkan pada data yang akurat dan koordinasi yang baik berpotensi menyebabkan ketidaktepatan program, ketimpangan layanan pendidikan, serta kurang optimalnya penggunaan anggaran pendidikan. Dalam era transformasi digital dan kebijakan pendidikan yang terus berkembang, Dinas Pendidikan dituntut untuk mampu menyusun program yang adaptif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah peserta didik

dan satuan pendidikan terbesar di Indonesia memiliki kompleksitas perencanaan pendidikan yang tinggi. Hal ini menuntut adanya sistem perencanaan yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai proses perencanaan program pendidikan serta mengidentifikasi kendala dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan, khususnya pada aspek perencanaan program pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Teori stakeholder yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Dalam perencanaan pendidikan, stakeholder seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memberikan data, masukan, dan evaluasi program pendidikan (Freeman, 1984).

METODE PENELITIAN

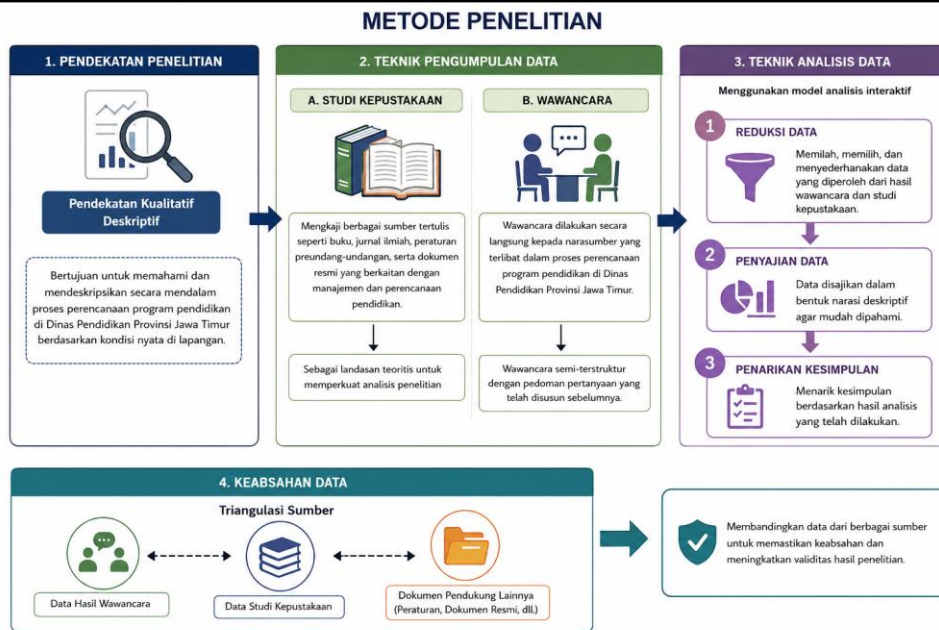
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses perencanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan manajemen dan perencanaan pendidikan. Data dari studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teoritis untuk memperkuat analisis penelitian.

Selain itu, wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus tetap terarah sesuai fokus penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data dari studi kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.



Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses sistematis dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pendidikan yang disusun secara terpadu dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Proses ini dilatarbelakangi oleh beragam faktor yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di suatu negara maupun daerah. Secara umum, perencanaan pendidikan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan dalam struktur ekonomi, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi menjadi faktor utama yang mendorong pentingnya perencanaan pendidikan. Selain itu, perencanaan pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyesuaikan layanan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta memperluas akses pendidikan secara adil dan merata.

Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan pendidikan mencakup proses penetapan visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan dalam sistem pendidikan. Latar belakang dan tujuan perencanaan pendidikan bersifat kontekstual, bergantung pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Pada umumnya, perencanaan pendidikan berkaitan erat dengan upaya pengembangan sistem pendidikan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti ketimpangan akses pendidikan, kemiskinan, dan ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan (Banurea dkk., 2023).

Perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan yang matang, arah dan tujuan pendidikan dapat dirumuskan secara jelas, serta didukung oleh strategi dan program yang tepat.

1. perencanaan pendidikan berfungsi untuk menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, baik dalam mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat, dunia kerja, maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. perencanaan pendidikan memungkinkan penyusunan program pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk dalam penentuan materi pembelajaran, metode pengajaran, serta sistem evaluasi.
3. perencanaan pendidikan berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan, seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
4. perencanaan pendidikan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan melalui mekanisme evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan perencanaan pendidikan memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, dan orang tua, sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan proses pendidikan (Aisyah, 2018).

Lebih lanjut, perencanaan pendidikan juga berfungsi dalam menciptakan sistem pendidikan yang terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Dengan adanya perencanaan yang komprehensif, setiap kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Selain itu, perencanaan pendidikan berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya, melalui identifikasi kebutuhan serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Di samping itu, perencanaan pendidikan turut meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan melalui pengelolaan dan alokasi sumber daya yang tepat. Tidak kalah penting, perencanaan pendidikan juga menjamin keberlanjutan sistem pendidikan dengan merumuskan langkah-langkah strategis yang mampu menjaga stabilitas dan perkembangan sistem pendidikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menjadi komponen esensial dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing (Herwina, 2023).

Prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan merupakan serangkaian pedoman yang perlu diperhatikan oleh perencana dalam menyusun rencana pendidikan secara sistematis dan terarah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan beberapa prinsip utama sebagai berikut:

1. Komprehensif, yaitu perencanaan harus memandang permasalahan pendidikan secara menyeluruh. Seluruh aspek pendidikan, baik formal maupun nonformal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, perlu mendapatkan perhatian yang proporsional dalam cakupan yang luas.
2. Integral, yaitu perencanaan pendidikan harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Integrasi ini tercermin dalam sistem serta prosedur pengelolaan pendidikan yang saling berkaitan.
3. Efisien, yaitu pemanfaatan sumber daya, khususnya anggaran yang terbatas, harus dilakukan secara optimal, tepat guna, dan terarah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
4. Interdisipliner, yaitu perencanaan pendidikan perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, mengingat pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan manusia.
5. Fleksibel, yaitu perencanaan tidak bersifat kaku, melainkan harus adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan serta tuntutan masyarakat.
6. Objektif dan rasional, yaitu perencanaan disusun berdasarkan pertimbangan

- yang logis dan ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
7. Berdasarkan data yang lengkap dan akurat, yaitu proses perencanaan harus didukung oleh data dan informasi yang valid serta komprehensif, sehingga hasil perencanaan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.
 8. Berkelanjutan (kontinu), yaitu perencanaan pendidikan harus memperhatikan kesinambungan program dan strategi yang dirancang, sehingga mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan pendidikan (Mubin, 2020).

Pembahasan

1. Gambaran Umum

Proses perencanaan program di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan mengacu pada arahan pimpinan daerah, khususnya gubernur. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan yang mengikuti periode kepemimpinan, sehingga setiap pergantian gubernur berimplikasi pada perubahan program prioritas yang harus dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan.

Secara umum, program yang dilaksanakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu program prioritas gubernur dan program teknis (tugas dan fungsi/tusi) yang disusun oleh masing-masing unit kerja. Program prioritas merupakan program strategis yang berasal langsung dari kebijakan gubernur, sedangkan program teknis merupakan program yang dikembangkan oleh unit-unit internal seperti bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Cabang Dinas (Cabdin), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, pada tingkat induk dinas juga terdapat program yang bersifat wajib, seperti belanja wajib dan kebutuhan operasional lainnya.

Dalam tahap perencanaan, Dinas Pendidikan menerima pagu anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pagu tersebut masih bersifat global (glondongan) dan mencakup komponen seperti belanja wajib, belanja program teknis, serta belanja untuk program prioritas. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan proses penjabaran (breakdown) terhadap pagu tersebut dengan mendistribusikannya ke berbagai unit kerja berdasarkan kebutuhan program masing-masing bidang, UPT, dan Cabdin.

Penting untuk dicatat bahwa pada tahap perencanaan, pagu anggaran yang diterima masih bersifat indikatif, sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan pada tahapan berikutnya. Proses perencanaan sendiri terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) rancangan awal, (2) rancangan, (3) rancangan akhir, dan (4) penetapan. Setelah tahap penetapan selesai, barulah proses berlanjut ke tahap penganggaran. Pagu anggaran yang bersifat final (fix) umumnya ditetapkan pada tahap penganggaran, bukan pada tahap perencanaan awal.

Dengan demikian, pada tahap perencanaan, fokus utama adalah merancang program, menentukan sasaran yang ingin dicapai, serta mengestimasi kebutuhan anggaran secara indikatif.

2. Tujuan Utama Program

Tujuan utama dari penyusunan dan pelaksanaan program di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Selain itu, program-program yang dirancang juga diarahkan untuk mengimplementasikan program prioritas gubernur sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan pelaksanaan teknis di tingkat OPD. Dengan demikian, seluruh program yang disusun tidak hanya berorientasi pada kebutuhan internal organisasi, tetapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

3. Standar atau Pedoman dalam Penyusunan.

Dalam penyusunan perencanaan program, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan pedoman khusus yang bersifat internal, melainkan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat hierarkis dan terintegrasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Selain itu, terdapat pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Dokumen RKPD disusun secara terpadu untuk seluruh OPD dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector. Dalam proses ini, setiap OPD, termasuk Dinas Pendidikan, berperan sebagai pihak pendukung (supporting) dengan mengusulkan program-program yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, penyusunan Renja Dinas Pendidikan harus mengacu dan selaras dengan RKPD yang telah ditetapkan. Program-program yang telah diusulkan dan tercantum dalam RKPD menjadi dasar utama dalam penyusunan Renja, sehingga terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan di tingkat daerah dan tingkat OPD.

4. Peran Stakeholder

Dalam proses perencanaan program, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya tidak menetapkan standar teknis khusus yang bersifat internal. Namun demikian, proses perencanaan tetap mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai sumber masukan strategis.

Salah satu mekanisme yang digunakan adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, setiap organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, diwajibkan untuk menyelenggarakan forum tersebut sebagai wadah konsultasi publik dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Dalam konteks Dinas Pendidikan, forum ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pendidikan, seperti akademisi, Dewan Pendidikan, serta unsur pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memberikan masukan, saran, serta perspektif yang konstruktif terhadap rancangan program yang akan disusun.

Masukan yang diperoleh dari Forum Perangkat Daerah tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan final, melainkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan (consideration) dalam proses penyusunan Renja. Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya bersifat top-down berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga mengakomodasi pendekatan bottom-up melalui partisipasi publik. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sektor pendidikan di daerah.

5. Evaluasi Kerja

Evaluasi terhadap kinerja program dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebagai pusat koordinasi perencanaan, Bappeda memiliki peran utama dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen dan pelaksanaan program yang disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Meskipun demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara operasional tetap dilakukan oleh unit internal, khususnya pada bagian Susunan Program dan Anggaran

(Sungram). Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu tingkat penyerapan anggaran dan capaian target kinerja program. Pada setiap periode tersebut, dilakukan pengukuran terhadap persentase realisasi anggaran serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, sistem evaluasi sebelumnya didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONA). Namun, saat ini mekanisme pelaporan dan evaluasi telah terintegrasi dalam sistem yang lebih terpusat melalui Laporan Capaian Pembangunan Daerah (LCPD). Melalui sistem ini, seluruh data capaian kinerja dan realisasi anggaran dilaporkan secara periodik dan terstruktur.

Selain evaluasi triwulanan, pada akhir tahun anggaran disusun dokumen evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang memuat analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan program selama satu tahun. Dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan proses verifikasi dan pembahasan (desk evaluation). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian, seperti ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan, perbedaan capaian target, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan pada periode berikutnya, sehingga tercipta siklus perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan (continuous improvement).

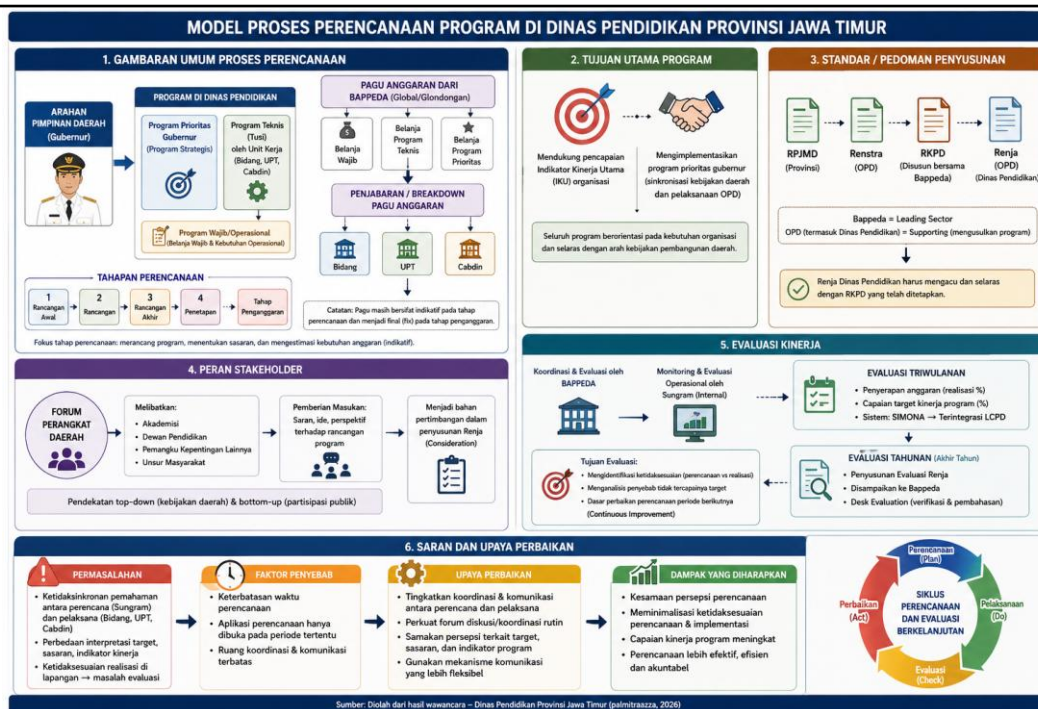
6. Saran dan Upaya Perbaikan dalam Proses Perencanaan

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses perencanaan program, salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah koordinasi dan komunikasi internal antara unit perencana dengan unit pelaksana. Selama ini, masih terdapat kendala berupa ketidaksinkronan pemahaman antara pihak yang menyusun perencanaan (bagian Sungram) dengan unit teknis di bidang, UPT, maupun Cabang Dinas (Cabdin).

Ketidaksinkronan tersebut umumnya berkaitan dengan perbedaan interpretasi terhadap target, sasaran, dan indikator kinerja program. Akibatnya, dalam pelaksanaan sering ditemukan ketidaksesuaian antara target yang telah direncanakan dengan realisasi di lapangan, baik dalam bentuk capaian yang tidak memenuhi target, melebihi target, maupun perbedaan arah sasaran program. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada saat proses evaluasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan waktu dalam proses perencanaan. Tahapan perencanaan umumnya memiliki batas waktu yang ketat, termasuk penggunaan aplikasi perencanaan yang hanya dibuka dalam periode tertentu. Hal ini menyebabkan ruang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi mendalam dengan seluruh unit pelaksana menjadi terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan intensitas diskusi dan koordinasi yang lebih efektif antara unit perencana dan pelaksana, baik melalui forum formal maupun mekanisme komunikasi yang lebih fleksibel. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesamaan persepsi terkait perencanaan program, sehingga dapat meminimalisasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi serta meningkatkan kualitas capaian kinerja secara keseluruhan (palmitraazza, 2026).



Gambar 2. Model Proses Perencanaan Program Dinas Pendidikan Jawa Timur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada kebijakan daerah serta dokumen perencanaan yang bersifat hierarkis. Perencanaan dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari rancangan awal hingga penetapan dan penganggaran. Program yang disusun meliputi program prioritas gubernur dan program teknis masing-masing unit kerja, dengan tujuan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menjaga keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan. Proses ini juga telah menerapkan pendekatan partisipatif melalui pelibatan stakeholder serta didukung oleh evaluasi berkala yang terintegrasi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan, keterbatasan waktu, serta kurang optimalnya koordinasi antar unit, yang berdampak pada efektivitas pencapaian kinerja program.

REFERENSI

- Aisyah, A. (2018) "Perencanaan Dalam Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), hlm. 715–731.
- Albab, U. (2021). Perencanaan pendidikan dalam manajemen mutu terpadu pendidikan islam. *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas Dan Pintar)*, 5(1), 119-126.
- Banurea, R. D. U., Simanjuntak, R. E., Siagian, R., & Turnip, H. (2023). Perencanaan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 88-99.
- Buchory, M. S., & Swadayani, T. B. (2014). Implementasi program pendidikan karakter di SMP. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Fattah, N. (2013). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Herwina, W. (2023) *Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Herwina, W. (2023). *Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat*. Bayfa Cendekia

Indonesia.

https://www.academia.edu/download/63615409/Pengembangan_Model_Perencanaan_Pendidikan2_0200613-66763-1qh51ie.pdf (Diakses: 16 April 2026).

Kurniatun, T. C. (2025). Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Bumi Aksara.

Mayasari, N., Arifin, M. M., Purnomo, D., Suyitno, M., Hikmah, N., Lestari, M. Z., ... & Sari, F. (2022). Perencanaan pendidikan. Sada Kurnia Pustaka.

Mubin, F. (2020) "Pengembangan Model Perencanaan Pendidikan," Development of an Education Planning Model]. doi, 10. Tersedia pada:

Palmitraazah, A. (2025) Interview with Anindya Palmitraazza for The Times, 20 April.

Terry, G. R. (2012). Principles of management. Homewood, IL: Richard D. Irwin.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA